

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kritik yang disampaikan oleh Tiyo Ardianto, selaku perwakilan atau representasi gerakan mahasiswa, dalam tayangan YouTube "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" bukanlah sekadar luapan emosi yang marah, melainkan bahasa perlawanan yang disusun secara sadar dan konsisten sebagaimana terlihat dari pola taktik kebahasaan yang berulang pada Tabel 5, serta keterkaitannya yang erat dengan temuan konkret penyimpangan tata kelola Badan Gizi Nasional (subbab 4.2.3.1) dan rangkaian represi digital yang dialami narasumber (subbab 4.2.3.2). Melalui sudut pandang Analisis Wacana Kritis, tayangan ini membuktikan bahwa mahasiswa menggunakan media digital sebagai panggung utama untuk melawan narasi penguasa. Langkah ini terpaksa diambil karena ruang-ruang penyampaian pendapat di dunia nyata sudah mulai dibatasi oleh tindakan-tindakan represi dari negara. Mahasiswa berusaha menjaga agar masyarakat luas tetap memiliki pemikiran yang kritis dalam menilai arah kebijakan yang ada. Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi bahwa fenomena tersebut merupakan manifestasi konkret dari krisis legitimasi (Habermas, 2004) yakni respons publik atas kegagalan negara memenuhi harapan rasional warganya sekaligus menjadi bukti empiris bahwa kanal YouTube Forum Keadilan TV berfungsi sebagai ruang publik tandingan (Fraser, 1990) bagi kelompok yang suaranya terpinggirkan dari ruang publik arus utama.

Dari segi pilihan bahasa atau dimensi tekstual, narasumber dengan cerdas menggunakan perumpamaan, sindiran, dan julukan yang berani untuk membongkar kelemahan pemerintah. Sebagai contoh, melalui penggunaan sebutan seperti "negara catering" dan "buruh outsourcing", narasumber berhasil menjatuhkan wibawa pejabat sekaligus meragukan niat baik di balik program Makan Bergizi Gratis. Pilihan kata ini sengaja diatur agar teguran tetap fokus pada masalah kebijakan dan sistem, bukan sekadar menyerang kehidupan pribadi presiden. Cara bicara yang mudah dicerna namun tajam ini terbukti ampuh menyentuh nalar penonton awam. Hasilnya, masyarakat yang awalnya percaya menjadi ikut ragu dan mulai menuntut pertanggungjawaban yang lebih nyata dari para pejabat.

Dari segi penyebaran pesan atau dimensi praktik diskursif, keberhasilan tayangan ini sangat terbantu oleh keberanian saluran independen seperti Forum Keadilan TV. Mereka berani memberikan panggung bebas tanpa potongan sensor yang biasanya sangat ketat diterapkan di televisi nasional. Algoritma YouTube kemudian bekerja secara alami menyebarluaskan video ini hingga berhasil ditonton oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Hebatnya lagi, para penonton tidak hanya sekadar menonton, tetapi ikut memotong video tersebut dan menyebarkannya kembali ke media sosial lain untuk menolak opini pemerintah. Istilah-istilah tajam dari narasumber pun akhirnya viral dan sering digunakan sebagai kalimat protes nyata di jalanan, seperti munculnya spanduk bertuliskan "Makan Beracun Gratis".

Dari segi keadaan masyarakat atau dimensi sosiokultural, teguran keras ini meledak karena warga memang sedang merasakan banyak kekecewaan. Janji manis kesejahteraan dari pemerintah nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan pahit di

lapangan, apalagi ditambah munculnya indikasi korupsi pada program gizi andalan mereka. Ironisnya, ketika kelompok mahasiswa mencoba mengingatkan hal ini, mereka malah dibalas dengan teror digital, penguntitan langsung, dan fitnah keji. Rentetan ancaman semacam ini pada akhirnya justru membenarkan kecurigaan mahasiswa bahwa pemerintah memang sedang bersikap anti-kritik dan memaksa kehendak. Tekanan berat inilah yang memaksa perlawanan mahasiswa menjadi jauh lebih berani dan berpindah sepenuhnya ke internet untuk melawan ketidakadilan tersebut. Secara khusus, yang ingin dikritisi dalam penelitian ini bukan sekadar Program Makan Bergizi Gratis sebagai satu kebijakan tunggal, melainkan pola relasi kuasa yang lebih luas seperti negara yang merespons krisis kepercayaan dengan kontrol dan represi, bukan dengan keterbukaan dialog rasional sebagaimana disyaratkan oleh sebuah kekuasaan yang legitim secara moral. Represi digital terhadap mahasiswa dalam hal ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan simptom dari pilihan struktural negara untuk menutup ruang publik alih-alih memperbaikinya, sehingga memaksa warga menciptakan ruang publik tandingannya sendiri di luar kendali negara.

Melalui rangkaian temuan tersebut, peneliti mengkritik keras sikap pemerintah yang selalu mengaku demokratis, tetapi di saat yang sama membiarkan teror siber merajalela menyerang warganya. Sebagaimana terlihat dari rangkaian ancaman siber, pembunuhan karakter, dan penguntitan fisik yang dialami Tiyo Ardianto tanpa adanya proses hukum terhadap pelaku (dibahas pada temuan 4.2.2 dan 4.2.3.2), negara terlihat sengaja lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang berani bersuara kritis. Di samping itu,

penelitian ini juga memunculkan temuan baru bahwa intimidasi digital saat ini terbukti sudah tidak mempan lagi untuk membuat pergerakan mahasiswa menjadi takut dan bungkam. Sebaliknya, ancaman-ancaman gelap dari internet itu justru membangkitkan rasa senasib yang membuat berbagai lapisan masyarakat semakin bersatu untuk saling mendukung. Kesimpulannya, alih-alih menghentikan protes, represi digital justru menjadi bensin yang membakar keberanian masyarakat sipil untuk melawan dengan lebih kuat di dunia maya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini masih memiliki batasan struktural dengan hanya memfokuskan penerapan analisis wacana kritis pada satu tayangan sinier spesifik di platform media YouTube. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya di bidang keilmuan komunikasi sangat dianjurkan untuk memperluas jangkauan analisis teks terhadap ragam bentuk represi digital di platform interaktif lain seperti TikTok atau X. Penggunaan kombinasi pendekatan metodologis mutakhir, seperti menggabungkan kerangka Analisis Wacana Kritis dengan metode Analisis Jaringan Sosial, diyakini dapat memberikan hasil pembedahan yang lebih komprehensif. Kombinasi perangkat analisis tersebut akan sangat berguna untuk memetakan secara presisi aktor-aktor tersembunyi yang mendistribusikan wacana perlawanan maupun propaganda represi di ruang publik digital. Eksplorasi lintas disiplin ilmu ini sangat diharapkan mampu merumuskan pijakan teori baru mengenai pola sirkulasi wacana tandingan masyarakat sipil di tengah era pengawasan algoritma.

5.2.2 Saran Praktis

Pemerintah dan pembuat kebijakan beserta seluruh aparaturnya keamanan negara harus segera menghentikan secara total segala bentuk pendekatan represif, kriminalisasi berekspresi, dan teror digital terhadap kelompok masyarakat sipil. Pembuat kebijakan publik wajib memosisikan kritik substantif dari mahasiswa sebagai materi evaluasi yang membangun untuk perbaikan tata kelola, bukan sebagai ancaman stabilitas yang harus dibungkam. Institusi penegak hukum negara harus segera membenahi kegagalan struktural dan mengusut tuntas seluruh indikasi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis agar tingkat kepercayaan rakyat dapat dipulihkan. Seluruh pejabat publik juga dituntut untuk membiasakan praktik dialog yang transparan dan berbasis data, alih-alih berlindung di balik operasi pembungkaman siber yang secara terang-terangan mencederai amanat konstitusi. Tanpa adanya ruang aman bagi kebebasan berekspresi warga, krisis legitimasi yang sedang dialami oleh rezim saat ini akan terus membesar dan berpotensi memicu gelombang penolakan yang jauh lebih masif.

Kelompok gerakan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat sipil perlu terus memperkuat pembangunan infrastruktur keamanan digital secara kolektif untuk memitigasi ragam ancaman represi otoritarianisme masa kini. Pengetahuan praktis mengenai literasi keamanan siber dan instrumen perlindungan data pribadi mutlak harus dijadikan kurikulum wajib di dalam setiap jenjang kaderisasi organisasi pergerakan. Para aktivis pergerakan juga disarankan untuk senantiasa merawat dan memperluas jaringan solidaritas transversal dengan berbagai kelompok masyarakat akar rumput yang merasakan penindasan struktural serupa.

Penggunaan taktik gaya bahasa dan strategi komunikasi publik harus terus diasah secara tajam agar rumusan narasi perlawanan dapat menjangkau akal sehat publik awam secara lebih membumi. Konsistensi dalam menyuarakan kritik berbasis data melalui berbagai ruang publik tandingan akan menjadi kunci penentu dalam upaya menjaga kewarasan sistem demokrasi dari ancaman hegemoni kekuasaan.

Seluruh platform media alternatif harus konsisten dalam menjaga independensi ruang redaksionalnya dan pantang tergoda oleh bujukan kooptasi dari pusaran lingkaran kekuasaan maupun jaringan oligarki. Pihak pengelola media independen selalu memegang tanggung jawab moral yang sangat besar untuk terus menyediakan panggung pencerahan dan ruang diskusi yang aman bagi kelompok yang terpinggirkan. Sebuah kerja sama strategis antara pengelola media alternatif, lembaga bantuan hukum, dan elemen pergerakan mahasiswa mendesak untuk segera dibangun demi menciptakan ekosistem perlindungan bagi narasumber. Eksistensi ruang publik tandingan digital ini harus terus direproduksi keberadaannya karena fasilitas tersebut merupakan benteng pertahanan terakhir bagi sirkulasi penyebaran wacana perlawanan yang jernih. Tingkat keberanian media massa alternatif dalam menyiarkan kebenaran sosial pada akhirnya akan menjadi pilar penentu bagi selamat atau runtuhnya iklim demokrasi dari pusaran krisis represi.